



## SUCCESS STORY

# Bulukumba closes gaps in school funding

**Striving to achieve national service standards in education, the district administration of Bulukumba increases budget support for local schools.**



A teacher leads a lesson in a classroom. Through Kinerja's BOSP assistance, district partners are able to tackle financial shortages facing their schools and ensure a safe and comfortable learning environment.

***“The BOSP formula benefits local governments by guiding their education budget planning, helps schools to identify total operation costs needed for a year and boosts community participation in school funding.”***

**– Drs. H. Isbair, MM  
Secondary School Supervisor,  
Bulukumba Education Office**

### **Kinerja**

BRI II Building 28<sup>th</sup> Floor, Suite 2807  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta, 10210  
Phone: +62 21 5702820  
Fax: +62 21 5702832  
www.kinerja.or.id

Although the national government of Indonesia provides funds to support schools' operational costs, many surveys have found the funds are insufficient to achieve minimum national standards and while many district administrations have additional funds available, they lack the tools to calculate the deficit between grant funds and operational needs.

However, technical assistance from USAID's Kinerja program has aided the administration of Bulukumba, South Sulawesi to calculate financial gaps facing the district's elementary and junior high schools. Based on the results of the analysis from the program's Educational Unit Operational Cost Analysis (BOSP) component, the administration allocated additional funds in its 2013 budget as part of its efforts to meet national service standards in education.

Kinerja's NGO partner, the Indonesian Institute for Education Innovation Training and Consulting (*Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia – LPKIP*) facilitated discussions with a variety of stakeholders to calculate the financial gap facing Bulukumba's schools using the BOSP formula, previously developed by USAID's DBE-I program.

Gathering data from school principals, district education administrators, district technical working units and staff from the local revenue and finance offices, LPKIP found that primary and junior high schools in Bulukumba district struggled with a deficit of more than IDR 7.6 billion every year.

Based on LPKIP's findings, Forum Bulukumba – whose members include teachers, principals, parents and community leaders from the district – conducted an advocacy campaign to persuade the local government to close this financial gap. The forum utilized various outreach channels, such as public discussions and mass media, to gather input on a draft regulation and to ensure the local government provided additional funds.

After seven months of advocacy, the Bulukumba Legislative Council (DPRD) approved a 12.5% increase in its support for both elementary and junior high schools' operating costs, rising from IDR 20 billion in 2012 to 23 billion in the 2013 amended budget, including IDR 50 million for BOSP calculation training and an awareness program for all schools within the district.

Drs. H. Isbair, MM, who supervises secondary schools at the Bulukumba Education Office, said the BOSP formula offered a variety of benefits for school stakeholders. “The formula provides a reference for the local government to plan its education budget and helps schools to calculate their total operational costs in a year. For the community, the formula will improve school transparency, leading to people's participation in school funding.”

Further, he expected the increased budget allocation would have an overall impact on education quality in the district. “With this additional budget allocation, I hope schools can improve their students' and teachers' quality as well as their school services,” he said.

Kinerja will continue to provide technical support for schools and district education offices to calculate budget shortages and supports initiatives to address financial shortfalls using local budget resources.

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS





## KISAH SUKSES

# Pemkab Bulukumba Bantu Sekolah Atasi Kekurangan Dana

**Dalam rangka mencapai standar pelayanan minimum di bidang pendidikan, pemerintah kabupaten Bulukumba menambah alokasi anggaran untuk sekolah di kabupaten Bulukumba.**



Guru sedang mengajar di kelas. Melalui program BOSP, mitra kabupaten Kinerja mampu membantu sekolah atasi kekurangan dana dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

**“Formula penghitungan BOSP memberikan acuan bagi pemerintah daerah untuk membuat rencana anggaran pendidikan, membantu sekolah menghitung kebutuhan biaya operasional tiap tahun dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendanaan sekolah.”**

– **Drs. H. Isbair, MM**  
**Pengawas sekolah menengah,**  
**Dinas Pendidikan Bulukumba**

### Kinerja

Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta, 10210  
Telepon: +62 21 5702820  
Fax: +62 21 5702832  
www.kinerja.or.id

Meskipun pemerintah pusat telah menyediakan dana bantuan operasional sekolah, banyak survei menunjukkan bahwa dana tersebut tidak cukup untuk mencapai standar pelayanan minimum. Banyak kabupaten mempunyai dana tambahan, tapi mereka belum memiliki alat untuk menghitung selisih dana bantuan dari pemerintah pusat dan biaya operasional yang dibutuhkan sekolah.

Melalui bantuan teknis dari Kinerja USAID, pemerintah kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menghitung kekurangan biaya yang dihadapi oleh SD dan SMP di kabupaten tersebut. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dalam program Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kinerja, pemerintah kabupaten Bulukumba mengalokasikan kenaikan anggaran untuk sekolah di APBD 2013. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai standar pelayanan minimum di bidang pendidikan.

Dalam program BOSP ini, organisasi mitra pelaksana Kinerja, Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) memfasilitasi diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghitung kekurangan dana operasional sekolah menggunakan formula BOSP yang dikembangkan oleh program DBE-I USAID.

Setelah mendapatkan data dari kepala sekolah, dinas pendidikan kabupaten, SKPD dan dinas pendapatan dan keuangan kabupaten, LPKIPI menemukan bahwa SD dan SMP di kabupaten Bulukumba kekurangan dana lebih dari Rp. 7,6 milyar setiap tahun.

Berdasarkan temuan LPKIPI tersebut, Forum Bulukumba (forum lintas pemangku kepentingan yang beranggotakan guru, kepala sekolah, orang tua murid dan tokoh masyarakat) melakukan sejumlah kegiatan advokasi kepada pemerintah kabupaten untuk menutup kekurangan dana sekolah. Forum ini menggunakan berbagai media advokasi, seperti diskusi publik dan media masa untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan peraturan bupati tentang petunjuk teknis penghitungan BOSP, peningkatan anggaran biaya operasional sekolah melalui program pendidikan gratis di Kabupaten Bulukumba dan memastikan bahwa pemerintah kabupaten mengalokasikan dana tambahan.

Setelah tujuh bulan proses advokasi, DPRD Kabupaten Bulukumba menyetujui kenaikan anggaran sebesar 12,5% untuk membantu biaya operasional SD dan SMP. Alokasi anggaran ini naik dari Rp. 20 milyar di APBD 2012 menjadi Rp. 23 milyar di APBD 2013 yang juga mencakup anggaran pelatihan dan sosialisasi BOSP untuk semua sekolah di Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 50 juta.

Drs. H. Isbair, MM, pengawas sekolah menengah di dinas pendidikan kabupaten menjelaskan bahwa formula BOSP memberikan banyak manfaat kepada pemangku kepentingan di sekolah. “Formula ini memberikan acuan bagi pemerintah daerah untuk membuat rencana anggaran pendidikan dan membantu sekolah menghitung kebutuhan biaya operasionalnya selama satu tahun. Bagi masyarakat, formula ini akan meningkatkan transparansi sekolah yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pendanaan sekolah.”

Lebih lanjut, Drs. H. Isbair, MM berharap bahwa kualitas pendidikan di Bulukumba meningkat seiring dengan penambahan anggaran. “Dengan adanya tambahan dana ini, saya harap sekolah dapat meningkatkan kualitas guru dan siswa, serta memperbaiki kualitas layanan sekolah,” ujarnya.

Kinerja melanjutkan dukungan teknisnya kepada sekolah dan dinas pendidikan kabupaten untuk menghitung kekurangan dana operasional dan mendukung upaya untuk menutup kekurangan dana tersebut menggunakan sumber daya di daerah.

DILAKSANAKAN OLEH RTI INTERNATIONAL DAN MITRA